

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **ANALISIS INVESTASI TIONGKOK DAN INDONESIA MELALUI SKEMA KERJA SAMA *BELT AND ROAD INITIATIVE***

Bab ini bertujuan untuk membahas tentang permasalahan berdasarkan rumusan masalah. Dalam bab ini penulis menggunakan kerangka teori yang akan membantu untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan hipotesa. Bab ini juga memuat penjelasan tentang metodologi penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan struktur penulisan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Belt and Road Initiative* merupakan salah satu bagian penting dari strategi geo-politik dan geo-ekonomi Tiongkok yang merupakan topik menarik untuk dikaji dalam Studi Hubungan Internasional. Bagaimana besarnya pengaruh kekuatan ekonomi Tiongkok terhadap negara-negara disekitar dan yang menjadi mitra dalam inisiasi tersebut sehingga banyak negara yang bekerja sama dalam inisiasi *Belt and Road Initiative*. Indonesia dipandang memiliki potensi yang strategis sebagai mitra utama di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang terjadi antara Tiongkok dan Indonesia inilah yang menjadi hal menarik bagi penulis untuk mengangkat topik dan menulisnya.

Kebijakan luar negeri sebuah negara memiliki peran dalam memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat internasional terhadap negara tersebut, dimana pasti ada kepentingan nasional sebuah negara dalam kebijakan luar negerinya. Oleh dari itu, kepentingan nasional sebuah negara dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari sebuah negara. (Sitepu, 2011)

Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) secara resmi diumumkan pada tahun 2013 di Kazakhstan, oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang. Kebijakan BRI memiliki dua komponen yaitu *Silk Road Economic Belt* yang menghubungkan Tiongkok ke Asia Tengah dan Selatan hingga ke Eropa yang terdiri dari jaringan rute kereta api, jalan raya, jaringan pipa minyak dan gas, dan proyek infrastruktur lainnya dan *New Maritime Silk Road* yang aktif dalam proyek dan rencana untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan. Gagasan baru yang telah digagas oleh Xi Jinping ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar negara serta meningkatkan hubungan perdagangan antara Tiongkok, Asia Tengah, dan Eropa. Dalam kebijakan ini, Tiongkok mempertimbangkan adanya kepentingan dan keuntungan yang akan didapat untuk negaranya, termasuk kepentingan ekonomi yang menjadi fokus utama untuk menjamin keberlangsungan negaranya.

Pada awalnya, inisiasi BRI ini dipahami oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok sebagai solusi ekspor baja ke wilayah barat Tiongkok, namun akhirnya inisiasi ini berhasil menciptakan sebuah koridor ekonomi dengan memadukan kekuatan geopolitik dan geoekonomi di negara-negara *middle power* di kawasan Eropa, Asia, Afrika dan Tiongkok yang menjadi pusatnya. Tiongkok telah menyediakan dana sebesar USD124 miliar ( $\pm$ Rp1.649 triliun) untuk mendukung infrastruktur jalur tersebut. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan kereta api cepat pada jalur darat, dan pengembangan pelabuhan laut pada jalur laut. (Sari, 2017). Ada lima tujuan utama dalam membangun jalur ini, yaitu:

1. Memperkuat sebuah komunikasi kebijakan yang mendukung sebuah kerja sama ekonomi,
2. Membuat koneksi jalan dan infrastruktur dengan jalur transportasi yang besar,

3. Menekankan pengurangan dan penghapusan halangan perdagangan dan investas (*Trade Barriers*),
4. Kerja sama keuangan yang berfokus pada penyelesaian mata uang untuk mengurangi biaya transaksi, dan
5. Hubungan *People-to-People*.

Sebagai negara pasar terbesar di ASEAN, Indonesia tidak luput dari perhatian kebijakan *Belt and Road Initiative* ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di pangkalan maritim terpadat di dunia. Indonesia secara alami menghubungkan pelayaran laut antara dua samudera, antara dua benua, dan antara pasar utama Asia. Indonesia sekarang memiliki semua prasyarat untuk pertumbuhan, terutama sebagai pemain internasional utama. Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, belum memiliki infrastruktur maritim yang memadai. Faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terkonsentrasi di pulau-pulau utama negara, tetapi konektivitas antar pulau masih kurang. Perusahaan biasanya menghabiskan biaya transportasi yang tinggi karena kurangnya pelabuhan laut dalam di Indonesia. Adanya komponen *New Maritim Silk Road* Tiongkok pada proyek BRI ini memberikan peluang bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan. Karena memang tujuan utama kebijakan presiden Xi Jinping ini ialah menekankan investasi antara Tiongkok dengan negara tetangga melalui bidang infrastruktur di sektor maritim (Hong, 2013).

Pada awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa terdapat perubahan pada visi dan misi Indonesia. Jokowi mempunyai 3 fokus utama dalam mencapai visi dan

misinya, yaitu: a. infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa; b. manusia sebagai subjek pembangunan, c. deregulasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (Kemendag, 2019). Objektifitas Jokowi dalam pembangunan infrastruktur adalah pada pembangunan maritim. Sehingga Jokowi melihat proyek BRI ini selaras dengan visi Jokowi yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kedekatan hubungan bilateral yang terjadi antara Tiongkok dan Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi dinilai merupakan masa terbaik, di mana hubungan antara dua negara tersebut semakin menguat sehingga menghasilkan berbagai macam kerja sama. Tiongkok dan Indonesia terlibat dalam berbagai macam kerja sama di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, serta pariwisata. Keduanya pun meyakini kerja sama bilateral demi menyalurkan gagasan Poros Maritim Dunia dan proyek BRI pada inisiatif *New Maritim Silk Road* melalui pembangunan infrastruktur. (Duta, Jokowi Kuatkan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Tiongkok, 2015)

Demi mewujudkan visi tersebut, Jokowi mengundang berbagai negara untuk bekerjasama dalam proyek tersebut dan bersama-sama menuntaskan konflik-konflik laut seperti pelanggaran batas zona laut, *illegal fishing*, pembajakan, dan polusi. Pembangunan infrastruktur maritim dalam pewujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dikisarkan membutuhkan dana sebesar Rp. 70 Triliun (atau setara dengan USD 5,6 Juta). Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan saluran dana dari investor asing di berbagai negara, khususnya Tiongkok yang memiliki proyek maritim pada kebijakan BRI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti:

“Apa yang menjadi faktor pendorong Tiongkok dan Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam skema *Belt and Road Initiative*?”

### **C. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Teori Kerja Sama Internasional dan konsep Kepentingan Nasional untuk menjawab rumusan masalah di atas.

#### **1. Teori Kerja Sama Internasional**

Adanya rasa saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain menandakan bahwa sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dengan negara lain. Dalam melakukan aktifitas kerja sama ini dibutuhkan suatu wadah untuk memperlancar kegiatan kerja sama tersebut. Kerja sama internasional dapat dilihat melalui berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan keamanan yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan bersama. (Perwita & Yani, 2005)

Kerja sama dapat timbul dari adanya komitmen antar negara terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut K.J. Holsti, proses terjadinya kerja sama bermula dari adanya perpaduan keanekaragaman dalam masalah nasional, regional, atau global yang muncul serta memerlukan perhatian lebih dari satu negara. K.J Holsti mendefinisikan proses terjadinya kerja sama internasional sebagai berikut (Holsti K. J., 1988):

1. Pandangan bahwa ada dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh suatu negara lainnya akan membantu negara itu

- untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tersebut antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
  4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
  5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Pendapat Holsti memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerja sama. Jika aktor dalam hubungan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan maka interaksi antar aktor tersebut akan menyebabkan konflik. Namun jika aktor yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerja sama.

Kerja sama internasional tidak hanya dilakukan oleh negara secara individual, tetapi juga dilakukan oleh negara yang bernaung dalam sebuah organisasi atau lembaga internasional. Pada dasarnya, kerja sama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan untuk mencapai kepentingan mereka. Kerja sama internasional dapat muncul ketika ada dua negara atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adanya upaya sebuah negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya juga merupakan salah satu bentuk dari kerja sama internasional.

Pelaksanaan kerja sama ini didahului dengan adanya tindakan-tindakan yang disalurkan dmelalui hubungan bilateral atau multilateral. Kerja sama bilateral merupakan

suatu konsep dalam hubungan internasional yang memiliki arti hubungan antar dua negara dengan menggunakan pengaruh masing-masing negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kerja sama bilateral juga bisa diartikan sebagai adanya kepentingan negara yang mendasari kesepakatan antar dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep Kepentingan Nasional menjadi sebagai dasar bagi negara dalam melakukan aktifitas hubungan internasionalnya. Kepentingan nasional sangat erat hubungannya dengan *power* sebuah negara. *Power* digunakan sebagai instrumen sebuah negara untuk mencapai sebuah kepentingan nasionalnya. Adanya hubungan antara kekuasaan dan pengendalian ini dapat dilakukan dengan teknik pemaksaan ataupun kerja sama. Oleh karena itu, *power* dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan tujuan dari tindakan sebuah negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Perwita & Yani, 2005). Praktik nyata dari adanya konsep kepentingan nasional ini dapat dilihat dari sifat hubungan internasional yang kompetitif serta konfliktual. Adanya Perang Dingin, perang-perang Dunia, Perang Tiga Puluh Tahun, sampai perang berbasis ekonomi merupakan contoh dari adanya konsep kepentingan nasional yang agresif. (Bainus & Rachman, 2018)

Pada dasarnya, kepentingan dalam hubungan internasional merupakan suatu alasan bagi aktor untuk melakukan hubungan internasional. (Steans & Pettiford, 2010). Kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional juga merupakan kemampuan minimum sebuah negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas

fisik (wilayah, daerah teritorial, tanah), identitas politik (rezim ekonomi dan politik), dan kultur (norma, linguistik, etnis) dari gangguan negara lain. (Morgenthau, 1978). Sehingga kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang menjadi unsur penting bagi sebuah negara.

Menurut Paul Seabury (Seabury & Codevilla, 2006), kepentingan nasional merupakan salah satu tujuan negara yang dapat diwujudkan melalui hubungan dengan negara lain. Tujuan sebuah negara dalam hal ini tidak hanya berfokus pada tujuan untuk memperoleh kekuasaan saja, tetapi juga berfokus pada cita-cita sebuah negara untuk menciptakan kestabilan dan juga pemerataan penyebaran pembangunan sebuah negara. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai tujuan utama sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu kepentingan nasional dijadikan sebagai target dari hubungan kerja sama, baik kerja sama secara bilateral maupun multilateral.

Terdapat dua klasifikasi dalam kepentingan nasional, yaitu, kepentingan nasional yang bersifat esensial atau sangat diperlukan dan kepentingan nasional yang bersifat tidak esensial. Kepentingan nasional yang bersifat esensial membahas tentang keberlangsungan hidup dari suatu negara beserta dengan nilai-nilai yang diterapkan serta telah ditetapkan sebagai politik luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan ini menjadi prioritas utama. Misalnya, ketika sebuah negara berusaha keras untuk mempertahankan identitasnya di dunia internasional. Kepentingan nasional yang bersifat tidak esensial atau kepentingan sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan keberadaan sebuah negara itu, namun tetap diupayakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional ini berasal dari masyarakat dari sebuah negara dan untuk masyarakat di negara tersebut. (Nincic, 1999) Kepentingan nasional diartikan sebagai faktor yang



menentukan sebuah negara untuk membuat keputusan dalam merumuskan sebuah kebijakan atau politik luar negeri.

Kepentingan nasional Tiongkok dalam kebijakan BRI adalah untuk melakukan kerja sama dalam menjalin hubungan antar negara dengan negara-negara lain untuk menjamin akses pasar dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonominya. Tiongkok juga memperhatikan kepentingan politiknya. Melalui BRI, Tiongkok dapat melakukan kerja sama dengan melakukan investasi pada proyek-proyek pembangunan jalur sutra baru sehingga dinilai akan mempererat hubungan Tiongkok dengan negara-negara yang terlibat. Luasnya cakupan dari proyek kebijakan BRI ini mampu membuat Tiongkok sebagai negara yang memiliki *power* kuat.

Salah satu kepentingan nasional Tiongkok dapat kita lihat pada ambisi Tiongkok yang ingin mengambil alih peran sebagai pemimpin kawasan di Asia. Ambisi ini dapat kita lihat dari bagaimana usaha Tiongkok dalam pembiayaan proyek infrastruktur terutama proyek kereta cepat yang bersaing ketat dengan Jepang. Jepang dan Tiongkok berebut pengaruh untuk menempati posisi sebagai pemimpin di kawasan Asia. Adanya proyek *High Speed Railway* (HSR) merupakan salah satu proyek infrastruktur dari BRI. Proyek ini menghubungkan negara-negara yang di lalui oleh BRI. HSR merupakan proyek jangka panjang Beijing untuk mengeksport teknologi yang lebih canggih dan menyeimbangkan kembali ekonominya. Bagi Tiongkok, proyek HSR melalui BRI dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengaruh politik yang lebih luas dengan memperdalam hubungan bilateral dengan mitranya. Sehingga posisi sebagai pemimpin kawasan di Asia dapat dipegang oleh Tiongkok.

Rivalitas yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok dalam proyek HSR ini merupakan salah satu contoh dari perebutan pengaruh untuk mendapatkan gelar pemimpin pada kawasan Asia. HSR Jepang dan Tiongkok memiliki keunggulannya masing-masing dalam memenangkan proyek di luar negeri. Seperti halnya jika Tiongkok menggunakan pendekatan *low cost*, maka Jepang menggunakan pendekatan *high quality*. Namun Tiongkok selangkah lebih maju karena Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Belt and Road Initiative* maka HSR Tiongkok semakin gencar dipromosikan sepanjang proyek BRI. Hal ini dapat kita ambil dari respon positif terhadap proyek BRI di negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand. Vietnam menghadapi beberapa masalah seperti kemacetan lalu lintas, penanganan limbah, serta masalah infrastruktur transportasi perkotaan. Sehingga Vietnam membutuhkan dana sekitar \$50 Milyar yang berasal dari AIIB. Filipina berencana untuk meminjam dana sekitar \$3.4 Milyar dari Tiongkok karena terdapat 3 proyek infrastruktur yang telah disepakati oleh Tiongkok dan Filipina, yaitu, proyek irigasi, proyek penyediaan air bersih, serta proyek kereta api. Begitu pula dengan Thailand yang bersedia untuk mengembangkan proyek infrastrukturnya terutama pada bidang perkeretaapian.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan teori Kerja Sama Internasional dan Konsep Kepentingan Nasional, maka dapat ditarik hipotesa bahwa melalui proyek kerja sama *Belt and Road Initiative* terdapat:

- a. Kepentingan nasional Tiongkok untuk memperkuat ekonomi negara serta memperluas konektivitas jalur sutera dan jalur maritim Tiongkok,
- b. Keselarasan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

## **E. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet, literatur laporan bentuk yang terkait, dan lain sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman (*understanding*). (Moleong, 1990). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang hasil publikasi dari buku-buku, artikel, jurnal, artikel berita, juga mendokumentasikan dan *press release* yang dikumpulkan dari situs resmi organisasi atau pemerintah yang terkait dengan topik penelitian. Di dalam proses penulisannya, skripsi ini akan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu. (Nazir, 2005). Dengan demikian, penulis akan mencoba menjelaskan karakteristik umum dari masalah yang di dapat melalui fakta-fakta yang jelas dan lengkap. Fakta-fakta yang akan dirangkumkan juga berasal dari sumber-sumber kredibel dan terkait dengan topik penelitian skripsi ini seperti jurnal, situs resmi pemerintah, berita dan lain-lain.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini akan disajikan dalam empat bab, masing-masing bab akan memaparkan informasi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini akan memaparkan tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian dan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan metode dan teknisnya, hal-hal tersebut meliputi, latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN, dalam bab ini akan mendeskripsikan keadaan obyektif mengenai objek penelitian yaitu hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia serta menjelaskan tentang program *Belt and Road Initiative*.

BAB III : PEMBAHASAN, memuat alasan pendorong Tiongkok dan Indonesia bekerja sama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014 melalui skema *Belt and Road Initiative*.

BAB IV : PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang merupakan rangkuman dari data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, dalam bentuk kesimpulan, saran dan rekomendasi.